

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	6%	N/A*	N/A*	N/A*
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional	Persentase	100 %	25%	25%	100%
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing					
2.1	Indikator 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,45% – 3,66%	N/A*	N/A*	N/A*
2.2	Indikator 2.2 Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi	Indeks	3 dari 4	N/A*	N/A*	N/A*
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Jumlah	6 KSEP dari 6 KSEP	1	0	80 %

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Capaian (%)
3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	16 %	30 %	187 %
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata					
4.1	Indikator 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	10,01%	12,7%	13,1%	103,4%
4.2	Indikator 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Jumlah	USD 1.400 - 1.479	1.344	1.345,61	100,11 %
4.3	Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF	Persentase	80 %	20%	20%	100%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 dari 4	133 %
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	-	-	-
VII	Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Capaian (%)
7.1	Indikator 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	92 %	Persentase	92%	23%

*) Tidak terdapat target triwulanan

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1: **Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja: Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan dan Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini diukur salah satunya melalui peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan. Untuk mendukung peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, dengan Kementerian Perindustrian sebagai *stakeholder* atau mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara industri pengolahan migas berada di bawah koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2024, industri pengolahan mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Industri Pengolahan non migas mencakup 16 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9. Industri Barang Galian bukan Logam
10. Industri Logam Dasar
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
12. Industri Mesin dan Perlengkapan
13. Industri Alat Angkutan
14. Industri Furnitur
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan target peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut: (i) Tahun 2025: 5,50%, yoy dan (ii) Tahun 2029: 8,14%, yoy. Untuk menetapkan target pertumbuhan tahunan pada periode antara tahun 2025 dan 2029, yaitu tahun 2026, 2027, dan 2028, dilakukan *forecasting* (peramalan) menggunakan deret waktu (*time series*) data lima tahun terakhir (2021 s.d. 2024). Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh target pertumbuhan industri pengolahan terhadap PDB untuk tahun-tahun tersebut sebagai berikut: (i) Tahun 2026: 5,70%, yoy; (ii) Tahun 2027: 6,85%, yoy; dan (iii) Tahun 2028: 7,81%, yoy.

Dikarenakan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Pemerintah menargetkan sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,85%, yoy

s.d 6,38%,yoy untuk tahun 2026, sehingga terdapat urgensi pemutakhiran target Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra D5 yaitu dari yang semula diproyeksikan sekitar 5,7%,yoy, meningkat menjadi 6%,yoy, dengan tetap konsisten menggunakan metodologi perhitungan yang sama. Penyesuaian target ini merupakan langkah strategis untuk (i) memperkuat posisi industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) Mempercepat transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas; dan (iii) meningkatkan daya saing industri domestik di tengah ketidakpastian global. Dengan pemutakhiran target yang lebih progresif, diharapkan transformasi struktur ekonomi dapat terakselerasi secara konsisten.

Target persentase realisasi indikator kinerja Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan tahun 2026 adalah sebesar 6%, diukur dengan formula berikut:

$$\text{Peningkatan NTB Industri Pengolahan (\%)} = \sum \frac{(\text{NTB Industri Pengolahan } t - \text{NTB Industri Pengolahan } t-1)}{\text{NTB Industri Pengolahan } t-1} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Penetapan target kinerja tahun 2026 sebesar 6% didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target kinerja ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	6 %	N/A	N/A	N/A

) Tidak terdapat target triwulanan

) Data BPS belum tersedia

Persentase realisasi Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB triwulan I tahun 2026 merupakan target tahunan sehingga target belum dapat tercapai. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPS belum merilis *update* PDB triwulan I tahun 2026 sehingga realisasi pada triwulan I tahun 2026 belum dapat diperoleh.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan	Terlaksana	Telah dilaksanakan pemetaan isu dan

	industri pengolahan khususnya non-migas;		permasalahan strategis melalui beberapa kegiatan: • Penyampaian Usulan Kajian Kebijakan dalam FKRI Tahun 2026 terkait dengan Penguatan Industrialisasi Kendaraan Listrik melalui Insentif TKDN dan Pengelolaan Limbah Baterai dan Pengembangan Eksosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru, 30 Januari 2026 • Pelaksanaan Kegiatan Pelepasan Peserta Pembinaan dan Pelatihan IKM ke Jerman, 14 Januari 2026 • Rapat Koordinasi Trilateral Eselon I sebagai Persiapan Rencana RPermenko dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kemenkes pada tanggal 20 Januari 2026; • Delegasi RI dalam Bilateral Policy Dialogue and Technology Exchange on Grid Flexibility and Hydrogen; dan Wilton Park Dialogue on "Industrial Strategy: Global Partnership for Frontier Industries and New Supply Chains", 9-11 Februari 2026 • Diskusi Perkembangan Kinerja Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT) tanggal 5 Maret 2026 • FGD "Strategi Integrasi Bahan Baku Berkelanjutan (Sustainable Material) dalam Rantai Pasok Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil" tanggal 12 Maret 2026 • Rapat Pembahasan Potensi Pengembangan Tanaman Malapari dan Produk Hilirnya Terutama Biofuel tanggal 12 Januari 2026
--	---	--	--

2.	Pengumpulan data dan informasi industri pengolahan khususnya non-migas;	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait antara lain: • Penyampaian Masukan untuk Pertemuan ke-7 WGTII RI-Rusia pada tanggal 13 Februari 2026 • FGD Strategi Integrasi Bahan Baku Berkelanjutan (Sustainable Material) dalam Rantai Pasok Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil tanggal 12 Maret 2026
----	---	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perilisan Turut hadir pada Sosialisasi Peraturan BPS Nomor 7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Implementasi pada Perizinan Berusaha berbasis Risiko pada 5 Januari 2026;
2. Ikut serta dalam Rapat Pembahasan Usulan Insentif Otomotif 2026 pada 8 Januari 2026;
3. Ikut serta dalam Rapat Harmonisasi RPermenPerin tentang Pusat Penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (PPBB) pada 9 Februari 2026;
4. Ikut serta dalam Rapat Harmonisasi RPP RIPIN tanggal 7 Januari 2026 dan Rapat Pembahasan RPP RIPIN Tahun 2025-2045 pada 23 Februari 2026;
5. Menghadiri Rapat Persiapan SKB ke-14 RI-Rusia, SKB ke-8 RI-Belarus, dan Pertemuan ke-7 WGTII RI Rusia pada 3 dan 4 Maret 2026;
6. Ikut serta dalam rangkaian rapat Harmonisasi RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 dan 9 Januari 2026, 3 Februari 2026, dan 26 Februari 2026;
7. Turut menyampaikan masukan tertulis atas Draft Submission Indonesia terkait Investigasi Section 301 Amerika Serikat mengenai Structural Excess Capacity dan Forced Labour pada tanggal 31 Maret 2026;
8. Ikut serta dalam rapat pleno harmonisasi RPermenperin tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Penolong (PPBB) pada 9 Februari 2026;
9. Ikut serta dalam Rapat Pleno Harmonisasi Atas RPermenperin tentang Verifikasi Penelusuran Teknis (VPT) Bidang Standardisasi Industri pada 9 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi

- rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi capaian belum dapat ditampilkan karena jadwal rilis data pertumbuhan PDB sektoral oleh BPS belum tersedia pada periode pelaporan ini. Namun, berdasarkan identifikasi ke deputian, terdapat beberapa kendala substantif yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target akhir 6% yoy, yaitu

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional.
2. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
3. Hambatan koordinasi akibat adanya transisi rencana perubahan struktur organisasi internal dan irisan substansi antar deputi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka mitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, kami mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas *Zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

1.2. Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional

Latar Belakang

Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan ANEKA (ILMATEA) merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontribusi signifikan terhadap industri pengolahan non migas. Pada Triwulan III-2025, kontribusi Industri LMATEA tercatat sebesar 4,51% terhadap PDB Nasional. Pada Tahun 2024, laju pertumbuhan Industri ILMATE rata-rata sebesar 4,10%, dimana laju pertumbuhan PDB Nasional hanya berkisar 5,03%, dan laju pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 4,75%.

Kebijakan utama pada Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka difokuskan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pada sektor industri pengolahan non migas khususnya logam, mesin, elektronika, dan aneka. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tanggung jawab penuh terhadap naik atau turunnya industri pengolahan non migas berada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Dalam rangka memperkuat daya saing industri nasional dan menjawab tantangan global pada era transformasi digital, diperlukan upaya untuk mendorong terbentuknya sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada Tahun 2029. Dalam konteks tersebut, industri semikonduktor merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Industri semikonduktor tercatat memberikan kontribusi sekitar 19% terhadap total perdagangan barang elektronik global. Pemerintah mendorong pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sebagai bagian integral dari penguatan sektor industri LMATEA. Semikonduktor merupakan teknologi kunci (*enabling technology*) yang menopang berbagai industri strategis, seperti elektronika, otomotif, alat kesehatan, pertahanan, energi terbarukan, serta teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem semikonduktor tidak hanya berorientasi pada aspek industri hulu–hilir, tetapi juga mencakup penguatan riset dan inovasi, pengembangan SDM, pembiayaan, regulasi, serta kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Sasaran Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan khususnya LMATEA yang berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis komoditi, meningkatkan ekspor serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional dilihat dari proses penyusunan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Peta Jalan tersebut berfungsi sebagai instrumen koordinasi lintas sektor dan lintas K/L dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan ekosistem semikonduktor secara terintegrasi, bertahap, dan berkelanjutan. IKU ini merupakan persentase dari pemenuhan bukti dukung pelaksanaan rapat koordinasi penyelesaian penyusunan peraturan presiden terkait peta jalan tersebut yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Adapun komponen penilaian berdasarkan progress pembahasan penyusunan peraturan presiden dari awal koordinasi penyusunan regulasi hingga penetapan peraturan presiden dan implementasi rencana aksi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata 2025-2029. Adapun target triwulan I sebesar 25%.

Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional dihitung berdasarkan pencapaian pengembangan pada RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor selama tahun 2026. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional :

1. Dukungan awal penyusunan regulasi = 25%
2. Rapat koordinasi penyelesaian hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor = 50%
3. Rapat koordinasi antar Kementerian pembahasan RPerpres = 75%
4. Perumusan Rancangan Peraturan Presiden = 100%

Masing-masing komponen tersebut dijabarkan dalam rencana aksi berikut:

1. Dukungan awal penyusunan regulasi

- Pelaksanaan rapat-rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor.
- Pengumpulan dan konsolidasi masukan substansi dari kementerian/lembaga terkait.
- Penyusunan draf awal R-Perpres.

2. Rapat koordinasi penyelesaian hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor

- Pemetaan potensi dan tantangan kondisi industri domestik dalam pengembangan industri semikonduktor.
- Perumusan alternatif penyelesaian untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor.
- Perumusan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor.

3. Rapat koordinasi antar Kementerian pembahasan RPerpres

- Finalisasi draf R-Perpres
- Penyempurnaan draf R-Perpres berdasarkan hasil pembahasan PAK

4. Perumusan Rancangan Peraturan Presiden

- Penyusunan laporan perumusan R-Perpres.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.2 Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional	Persentase	100 %	25%	25%	100%

Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional pada triwulan I didapatkan dari tersusunnya RPerpres Pengembangan Semikonduktor dan Teknologi Baru hasil dari rangkaian pembahasan dan konsolidasi masukan dari stakeholder terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan rapat-rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor.	Tertunda	Persiapan Pertemuan/FGD Lanjutan Pembahasan Rancangan Perpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru akan dilaksanakan pada bulan April 2026 (Triwulan II-2026)
2	Pengumpulan dan konsolidasi masukan substansi dari kementerian/lembaga terkait.	Terlaksana	Telah disusun Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Semikonduktor dan Teknologi Baru per 4 Maret 2026 berdasarkan masukan substansi dari kementerian/lembaga terkait.
3	Pemetaan potensi dan tantangan kondisi industri domestik dalam pengembangan industri semikonduktor	Terlaksana	• Menerima audiensi dari GE Healthcare dengan agenda Diskusi dan Paparan Kesiapan Produk CT Scan Lokal Hasil Kolaborasi Industri Nasional dan Global dan Dukungan Penguatan Industri Alat Kesehatan Nasional • Persiapan kunjungan KBRI ke Arizona US terkait Semikonduktor

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Sekjen KADIN untuk komite bilateral benelux terkait Tindak Lanjut Kerja Sama BtoB KADIN dengan Hightech NL pada 26 Januari 2026.
2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut *Joint Declaration of Intent on Trade Promotion Programme for Small and Medium-Sized Industries "Partnering in Business in Germany"* (Jdol PG) pada 4 Februari 2026.

3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi rencana penandatanganan MoU kerja sama dengan High Tech NL pada 6 Februari 2026

Seluruh komponen rencana aksi pada indikator Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional sepanjang triwulan I tahun 2026 telah **terlaksana**. Untuk itu, capaian realisasi indikator ini telah tercapai 25% sesuai dengan target yaitu 25% untuk triwulan I-2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, meskipun target kinerja makro tercapai 100% (realisasi 25% dari target 25%), terdapat kendala institusional yang berpotensi menghambat akselerasi perumusan kebijakan pada triwulan berikutnya, yaitu:

1. Adanya irisan tugas dan fungsi (tupoksi) pengawalan isu semikonduktor antar unit kerja lintas Deputi/Kementerian, yang berdampak pada asimetri informasi/dualisme komunikasi dengan stakeholders utama (seperti asosiasi industri dan investor global) serta menghambat proses dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait perihal pembagian peran dalam pengembangan ekosistem semikonduktor.

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Latar Belakang

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025 yang diolah oleh Pusdatik Kemnaker, tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 92,67 juta per tenaga kerja per tahun. Meskipun menunjukkan tren peningkatan konsisten, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih 10% di bawah rata-rata ASEAN sehingga menjadi tantangan utama dalam mendorong GDP, GNI per kapita, dan capaian Indonesia emas 2045.

Tantangan peningkatan produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks kualitas dasar, Indonesia terus berupaya memulihkan capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022 agar dapat mendekati rata-rata negara OECD yang berada di angka 488,33. Rendahnya literasi ini menjadi hambatan struktural dalam adopsi teknologi di tempat kerja.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan angkatan kerja Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025, dari total 154 juta angkatan kerja, struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah. Proporsi angkatan kerja lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah) sebesar 51,86%, sementara lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 35,08%, dan lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Universitas) baru mencapai sebesar 13,06%.

Kualifikasi pendidikan yang belum optimal ini berdampak langsung pada daya serap tenaga kerja, di mana persentase pekerja yang mampu mengisi jabatan di sektor formal sebesar 42,20%. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar **3,45% - 3,66%** penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target kinerja ini merupakan target per semester sehingga tidak terdapat target per triwulan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
-------------------------------	--------	----------------------	-------------------------	-----------	--------------

IKU 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,45%- 3,66%	N/A)	N/A)	N/A)
---	------------	--------------	------	------	------

) Data BPS belum tersedia

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terlaksana	• Koordinasi kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja bidang welder dan hospitality untuk mengisi pasar kerja luar negeri termasuk pemetaan lembaga pelatihan dan penempatan tenaga kerja (pelaksanaan rapat tanggal 9 Januari dan 25 Februari 2026). • Koordinasi Penguatan Sistem Ketenagakerjaan melalui dashboard Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang terintegrasi antar K/L • Monitoring penetapan upah minimum 2026 • Koordinasi kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan Pekerja Swasta, serta pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Berbasis Aplikasi • Koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan update program dan identifikasi kebutuhan anggaran untuk program strategis Welder dan Hospitality. Progres program dan identifikasi anggaran disampaikan kepada Menko Perekonomian pada Januari 2026.
2. Menyampaikan surat dukungan untuk program pelatihan Welder dan Hospitality kepada KP2MI untuk melanjutkan proses pengajuan anggaran yang telah diusulkan kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu pada 27 Februari 2026.
3. Monitoring pelatihan welder dan hospitality di PT PAL Surabaya dalam rangka persiapan implementasi program.
4. Mempersiapkan dasar hukum untuk memudahkan koordinasi, data sharing, dan integrasi melalui Tim Persiapan Pembangunan, Pengembangan, dan Penerapan Dashboard Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nasional. Konsep dasar hukum disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Februari 2026.
5. Diskusi terkait The Decent Work Country Programs bersama perwakilan ILO.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya, di antaranya:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan lebih banyak proses koordinasi, sinkronisasi dan pemberian layanan melalui aplikasi teleconference seperti Zoom.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Program pelatihan Welder dan Hospitality belum dapat dilaksanakan di Triwulan I 2026 dikarenakan pengajuan anggaran masih dalam proses review DJA Kemenkeu.
2. Proses pengusulan penyiapan Dashboard Sistem Informasi Ketenagakerjaan belum mendapatkan arahan dan persetujuan dari Sesmenko mengingat adanya efisiensi anggaran.
3. Aplikator layanan transportasi mengharapkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menetapkan kebijakan Pemberian Bonus Hari Raya.
4. Berdasarkan hasil monitoring penetapan upah minimum provinsi 2026, terdapat beberapa catatan atas besaran kenaikan yang ditetapkan, diantaranya (i) Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2026 tidak sesuai dengan PP 49 tahun 2025; (ii) Provinsi Papua Tengah tidak menerapkan kenaikan nilai UMP 2026; dan (iii) Provinsi Jawa Tengah menerapkan nilai alpha tertinggi yakni 0,9%.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pembahasan percepatan persetujuan anggaran untuk program welder dan hospitality melalui Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan K/L terkait.
2. Usulan aplikator layanan transportasi akan menjadi masukan dalam penyusunan peraturan BHR tahun berikutnya.

3. Monitoring upah minimum di beberapa lokus dalam rangka mendapatkan masukan dan evaluasi atas penetapan kenaikan UMP 2026.
4. Monitoring lembaga pelatihan welder dan hospitality di beberapa lokus dalam rangka persiapan implementasi.

2.2 Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Latar Belakang

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 yang diolah oleh Pusdatin Kemnaker, tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 89,33 juta per tenaga kerja per tahun. Meskipun menunjukkan tren peningkatan konsisten, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih 10% di bawah rata-rata ASEAN sehingga menjadi tantangan utama dalam mendorong GDP, GNI per kapita, dan capaian Indonesia emas 2045.

Tantangan peningkatan produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks kualitas dasar, Indonesia terus berupaya memulihkan capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022 agar dapat mendekati rata-rata negara OECD yang berada di angka 488,33. Rendahnya literasi ini menjadi hambatan struktural dalam adopsi teknologi di tempat kerja.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan angkatan kerja Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025, dari total 154 juta angkatan kerja, struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah. Proporsi angkatan kerja lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah) sebesar 51,86%, sementara lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 35,08%, dan lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Universitas) baru mencapai sebesar 13,06%.

Kualifikasi pendidikan yang belum optimal ini berdampak langsung pada daya serap tenaga kerja, di mana persentase pekerja yang mampu mengisi jabatan di sektor formal sebesar 42,20%. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Adapun target kinerja ini merupakan target per semester sehingga tidak terdapat target per triwulan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program	Indeks	3 dari 4			

Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi			N/A)	N/A)	N/A)
--	--	--	------	------	------

) Data belum tersedia

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Laju Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Monitoring Efektivitas Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025	Terlaksana	Untuk meningkatkan efektivitas Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi dilakukan beberapa hal sebagai berikut: • Monitoring data kepesertaan yang masih aktif melaksanakan program magang lulusan perguruan tinggi. • Koordinasi implementasi dan penganggaran program pemagangan untuk 2026 melalui Rakor Penganggaran Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026 tanggal 25 Februari 2026 • Monitoring pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi di PT PAL pada 9 Maret 2026 dan Biofarma pada 12 Maret 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat dukungan untuk program pemagangan lulusan perguruan tinggi kepada Kemnaker untuk mengusulkan anggaran pelaksanaan program tahun 2026 tanggal 27 Februari 2026.
2. Koordinasi penyampaian surat dukungan yang diajukan Kemnaker kepada Bapak Presiden tanggal 30 Maret 2026 terkait sejumlah program prioritas ketenagakerjaan, termasuk program magang perguruan tinggi beserta anggarannya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya, di antaranya:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan lebih banyak proses koordinasi, sinkronisasi dan pemberian layanan melalui aplikasi teleconference seperti Zoom.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat penurunan peserta magang aktif dari jumlah yang ditetapkan di awal (100 ribu orang) dengan berbagai alasan, seperti kendala lokasi, sudah diterima kerja, maupun mengundurkan diri dengan alasan lainnya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengevaluasi penurunan serta aduan peserta dan penyelenggara magang untuk menjadi rekomendasi perbaikan pada *batch* berikutnya.
2. Persiapan keberlanjutan program pemagangan lulusan perguruan tinggi tahun 2026, seperti target peserta, anggaran, perbaikan sistem, dll.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 3: **Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing;
2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing

Latar Belakang

Indikator ini mengukur besarnya jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang telah dinyatakan selesai secara perencanaan dan siap untuk diimplementasikan. KSEP yang dimaksud merupakan kawasan yang telah difasilitasi percepatan pembangunannya melalui koordinasi lintas sektor oleh Kementerian

Koordinator, serta telah mendapatkan dukungan regulatif dan kebijakan dari instansi terkait.

KSE yang menjadi target merupakan KI, KSPN, dan/atau KPBPB yang diprioritaskan atau dipilih berdasarkan daftar KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Pada tahun 2026 ini, terdapat 6 KSE Prioritas yang menjadi target dari 20 KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Kriteria kawasan strategis ekonomi yang diprioritaskan meliputi:

1. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
2. Mendukung kebijakan dan arahan Presiden;
3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi;
4. Menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam.

Data yang digunakan bersumber dari antara lain:

1. Progres pelaksanaan KSE berdasarkan dengan data monitoring dan evaluasi;
2. Realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM;
3. Data Investasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Badan Pengusahaan BBK dan/atau Dewan Kawasan BBK, dll); dan/atau
4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kawasan Ekonomi dari Badan Usaha Pengelola.

Tercapainya target atas Indikator “Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No. 66/2024 tentang HPT, Perpres No. 79/2024 tentang P3NK, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
3. Paparan terkait Progres Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
4. Laporan Semester terhadap Hasil Evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
5. Laporan evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
7. Kajian Dampak Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas terhadap nasional dan regional.

Target KSEP untuk Tahun 2026 adalah 6 dari 6 KSEP dengan daftar KSEP sebagai berikut:

1. Kawasan Industri Terpadu Batang
2. Kawasan Industri Weda
3. Kawasan Industri Obi
4. Kawasan Industri Ketapang
5. Kawasan Industri Morowali
6. Kawasan Industri Sentra Lamongan

Pengukuran realisasi kinerja IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing didasarkan pada jumlah realisasi Kawasan Strategis ekonomi sebanyak 6 (enam) Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas.

Kriteria KSE yang berdaya saing memiliki kriteria sebagai berikut

1. Realisasi Investasi yang Berkelanjutan: Kawasan telah menunjukkan adanya investasi yang berkelanjutan, di mana pengembangan kawasan dilakukan

secara konsisten melalui realisasi investasi secara kontinyu dalam pembangunannya.

2. Ketersediaan Aksesibilitas Eksternal: Kawasan memiliki akses yang memadai dari luar, termasuk ketersediaan jalan akses menuju kawasan serta keterhubungan dengan pelabuhan atau bandara sebagai bagian dari sistem logistik yang mendukung.
3. Keberadaan Badan Pengelola atau Investor: Terdapat badan pengelola kawasan atau pihak investor yang aktif berperan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.
4. Status Operasional dan Kesiapan Pembangunan: Kawasan telah siap beroperasi dan mendukung kegiatan pembangunan, ditunjukkan dengan kesiapan dalam menerima tenant serta telah terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di dalam kawasan.

Dalam hal, KSE yang ditargetkan belum memenuhi 4 kriteria yang ditentukan maka belum mencapai target yang ditentukan. Adanya penambahan indikator baru pada penyelesaian IKU 3.1. Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing yaitu Penyelesaian Perizinan Lanjutan dengan bobot 100%.

Hasil IKU ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Total\ KSEP = \sum \text{Jumlah KSEP yang telah memenuhi kriteria dan beroperasi}$$

Adapun rincian Realisasi Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing hingga TW I 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	KSEP	1 dari 6 KSEP	0 dari 6 KSEP	80%

Hingga triwulan I tahun 2026, jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) belum terealisasi pada Triwulan I Tahun 2026, namun untuk progress kinerja sudah mencapai 80%. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian progres pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas terkait penyelesaian pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Weda, Kawasan Industri Obi, Kawasan Industri Ketapang, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Sentra Lamongan sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif dengan progres 80%. Penyelesaian Jumlah KSEP yang Berdaya Saing yang dicapai dalam target triwulan 1 ini adalah jumlah KSEP yang sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif.

Sampai dengan akhir Triwulan I, telah dilakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong percepatan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas, antara lain:

1. Koordinasi dan monitoring dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk memastikan kepastian penyelesaian pembangunan di kawasan strategis.
2. Koordinasi evaluasi proyek-proyek eksisting dan usulan baru yang berlokasi dalam kawasan prioritas, sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan ke depan.

3. Sosialisasi kepada pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait guna membangun pemahaman dan dukungan terhadap arah pengembangan kawasan strategis.
4. Diseminasi capaian pengembangan kawasan melalui media nasional sebagai bentuk transparansi dan upaya meningkatkan partisipasi publik.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 6 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas dengan K/L terkait serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Finalisasi Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 3 Maret 2026 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 14 Januari 2026 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Implementasi Skema Pembiayaan Kreatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur di Indonesia pada tanggal 5 Maret 2026
2.	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di 6 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kawasan Industri Hijau Futong a.n. PT Asia Pacific Chemical di Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 27 Januari 2026 - Telah dilaksanakan Rapat Ekspose Persiapan Penelitian Tim Terpadu Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas

			Sosial Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kebumen pada tanggal 5 Maret 2026
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas
- Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

○ **3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)**

Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan dan tujuh agenda pembangunan nasional. Ketujuh agenda tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yang mencakup aspek pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Indikator Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang Siap Beroperasi mencerminkan capaian implementasi pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait. Proyek-proyek ini berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dinyatakan Telah Selesai adalah sebagai Berikut:

1. Sektor Kawasan (contohnya Kawasan Industri):
Proyek dinyatakan selesai apabila telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang berlaku secara efektif.
2. Sektor Transportasi, Energi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Sanitasi:

Proyek dianggap selesai ketika telah memasuki tahap operasional atau mulai beroperasi secara fungsional.

3. Sektor Bendungan:

Proyek dikategorikan selesai saat dimulainya proses pengisian awal bendungan (*impounding*), setelah seluruh konstruksi bendungan dinyatakan tuntas.

Pencapaian terbangunnya PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 dan Permenko Nomor 19 Tahun 2025, daftar PSN terbaru mencakup 226 proyek dan 26 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tercapainya target atas Indikator “Penyelesaian Proyek Strategis Nasional” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.66/2024 tentang HPT, Perpres 79/2024 tentang LVC, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional;
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dalam bentuk PPT);
4. Laporan Semester KPIIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (Laporan Tahunan);
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Penyusunan Project Completion Report (PCR);
8. Kajian Dampak PSN terhadap nasional dan regional.

Target Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun Anggaran 2026 adalah penyelesaian 9 dari 10 proyek dengan persentase 83% dengan daftar proyek sebagai berikut:

1. KI Tanah Kuning (PT ISI)
2. KI Kuala Tanjung
3. Tol Sigli - Banda Aceh
4. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)
5. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)
6. Tangki LPG Kupang (1 sub proyek dari 4 proyek PSN Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG--sub lainnya sudah selesai)
7. Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Tahap II (bagian dari PSN Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai)
8. RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP))
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang
10. SPAM Regional Benteng – Kobema

Penetapan target Tahun 2026 didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek hingga Desember 2025. Dalam pelaksanaan Tahun 2026, proyek tersebut memerlukan kepastian terhadap beberapa aspek, antara lain: 1) Alokasi anggaran APBN/APBD; 2) Ketersediaan anggaran investasi Badan Usaha; dan 3) Penyelesaian berbagai isu, seperti pengadaan lahan, KKPR, dan perizinan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka penetapan target sebesar 9 dari 10 ditetapkan secara realistis dan terukur.

Formula pengukuran target penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2026 dihitung dengan membandingkan jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dengan jumlah total proyek yang ditargetkan selesai pada tahun tersebut. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan persentase capaian realisasi proyek terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan triwulanan atau tahunan.

Cara Pengukuran target penyelesaian PSN di Tahun 2026:

10. Identifikasi PSN yang masuk ke dalam Major Project RPJMN;
11. Menentukan target jumlah PSN di tahun 2026 sebanyak 10 proyek,

$$\text{Persentase Penyelesaian PSN} = \frac{\sum \text{proyek selesai}}{\sum \text{target proyek selesai}} \times 100\%$$

Adapun rincian Realisasi IKU 3.2 yaitu Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga TW I 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	16%	30%	187 %

Hingga triwulan I tahun 2026, persentase penyelesaian PSN telah terealisasi sebesar 30% yang didapatkan dari persentase jumlah PSN yang telah selesai dibandingkan dengan jumlah PSN yang ditargetkan selesai pada triwulan I tahun 2026. Persentase penyelesaian PSN pada triwulan I didapatkan dari penyelesaian pembangunan 3 dari 10 proyek pada triwulan I tahun 2026. Adapun 3 PSN yang telah didorong penyelesaiannya oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata hingga triwulan I tahun 2026 antara lain:

No.	Nama Proyek	Sektor
1.	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
2.	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
3.	RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP))	Energi

Untuk tahun 2026, ditargetkan 10 PSN selesai. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata mendorong 10 PSN agar dapat selesai di tahun 2026. Berikut merupakan daftar proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor
KI Tanah Kuning (PT ISI)	Air Bersih Dan Sanitasi
KI Kuala Tanjung	Kawasan
Tol Sigli - Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
Tangki LPG Kupang (1 sub proyek dari 4 proyek PSN Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG--sub lainnya sudah selesai)	Energi
Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Tahap II (bagian dari PSN Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang – Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai)	Energi
RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP)	Energi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Air Bersih dan Sanitasi
SPAM Regional Benteng – Kobema	Air Bersih dan Sanitasi

Sampai dengan Triwulan I, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain:

- Koordinasi dan Monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
- Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
- Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.

- Penyelesaian hambatan kendala dan *debottlenecking* dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek PSN yang ditargetkan
- Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian teknis terkait perizinan dalam Pembangunan PSN.
- Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat Koordinasi dan monitoring terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Penyiapan Data Dukung Pendanaan Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional pada tanggal 22 Januari 2026 2. Telah dilaksanakan Rapat Prioritisasi Dana Pengadaan Tanah LMAN Tahun Anggaran 2027 pada tanggal 28 Januari 2026
2.	Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Target Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026 pada tanggal 26 Januari 2026
3.	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan <i>list pilot project</i> dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Lokakarya 3.1 “Peluang Bisnis dan Tahapan Implementasi TOD Tawang dan Weleri” pada tanggal 12 Maret 2026
4.	Sosialisasi regulasi turunan alternatif pembiayaan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pelaksanaan

	infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)		Skema Pendanaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 4 Maret 2026
5.	Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang Port di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Januari 2026
6.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2025 kepada Presiden	Terlaksana	Telah disampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Semester II Tahun 2025 kepada Bapak Presiden RI pada tanggal 27 Februari 2026
7.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Telah dilaksanakan publikasi melalui Instagram KPPIP @kppip
8.	Evaluasi dampak ekonomi dan manfaat PSN yang telah selesai	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi PSN yang Dikelola PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 14 Januari 2026 2. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 10 Maret 2026 3. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi PSN yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Maret 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Proses penyusunan revisi Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dituangkan dalam Peraturan Menko masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait. Saat ini, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata juga tengah mengevaluasi baik usulan proyek baru maupun proyek yang sudah ada, termasuk

mempertimbangkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar PSN.

- Revisi Peraturan Presiden terkait KPPIP masih berada dalam tahap persiapan administratif dan koordinasi antarlembaga, sebelum dapat diajukan secara resmi.
- Terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan, khususnya terkait permasalahan pengadaan lahan yang masih berlangsung, seperti tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, lahan di kawasan hutan, serta tanah milik instansi. Permasalahan ini mencakup aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.
- Masih terdapat hambatan terkait kebutuhan tambahan anggaran atau pendanaan untuk sejumlah proyek.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sebagai upaya untuk menyelaraskan substansi kebijakan, menghimpun masukan teknis, serta memastikan adanya dukungan dan kesepahaman lintas instansi terhadap arah perubahan kebijakan yang sedang disusun.
- Melaksanakan koordinasi lanjutan apabila terjadi hambatan (debottlenecking) dalam proses pembahasan. Bila muncul kendala atau perbedaan pandangan, maka akan dilakukan dialog ulang dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang konstruktif dan menjaga agar proses tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Diperlukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas permasalahan pengadaan lahan dan perizinan yang masih menjadi kendala.
- Perlu disiapkan skema pembiayaan alternatif guna mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terkendala proses pendanaan.
- Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian isu yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi kebijakan.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata** Saing ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman
2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)
3. Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Latar Belakang

Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, peningkatan kapasitas produksi pada sektor-sektor produktif, termasuk sektor pariwisata, perlu dilaksanakan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah perjalanan dan kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi pada berbagai lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata.

Salah satu lapangan usaha yang mencerminkan perkembangan aktivitas pariwisata adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Lapangan usaha ini diperkirakan terus berkembang dan berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerjanya dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, serta pelaksanaan berbagai kegiatan, pertemuan, dan event di destinasi pariwisata.

Dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencakup kegiatan penyediaan akomodasi atau penginapan jangka pendek bagi pengunjung dan pelancong lainnya, serta penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera. Lapangan usaha ini terdiri atas subsektor penyediaan akomodasi serta subsektor penyediaan makan minum.

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum digunakan sebagai salah satu indikator kinerja sektor pariwisata karena memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas perjalanan wisata dan memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2025, kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku mencapai 2,68 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,64 persen. Kontribusi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Lapangan Usaha Jasa Lainnya, yang antara lain mencakup kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi, dengan kontribusi sebesar 2,14 persen pada tahun 2025.

Pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan persentase (%) peningkatan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun tertentu (t1) yang dibandingkan dengan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun sebelumnya (t-1). Persentase peningkatan nilai tambah sektor akomodasi makanan dan minuman diperoleh dengan mencari selisih antara PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t1 dengan PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t-1. Adapun formulasi penghitungan pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDBakmmt1} = [(PDBakmmt1 - PDBakmmt - 1) / PDBakmmt - 1] \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 10,01% yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2026 dan RPJMN 2025-2029. Tidak terdapat target triwulanan pada dokumen perencanaan nasional, sehingga target triwulanan adalah hasil proyeksi internal Deputy V, untuk triwulan I 2026 indikator pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman ditargetkan sebesar 12,7%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman yang telah terealisasi sebesar 13,1% atau tercapai 103,4% dari target triwulan I tahun 2026 sebesar 12,7% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	10,01	12,7	13,1	103,4

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan capaian yang positif, yaitu sebesar 13,14 persen secara tahunan (*year-on-year*). Capaian tersebut melampaui target Triwulan I tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar 12,70 persen, dengan tingkat pencapaian sebesar 103,46 persen. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya aktivitas usaha akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event pada awal tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

1	Pemetaan Isu Strategis dan Permasalahan terkait Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Arah Kebijakan dan Program Tahun 2026 dengan seluruh Eselon I Kementerian Pariwisata pada 30 Januari 2026
2	Pengumpulan Data dan Informasi terkait Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	Telah dilaksanakan audiensi ke Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Bappenas terkait Percepatan dan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata pada 5 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti rapat koordinasi pembahasan penetapan 3 (tiga) RPerpres RIDPN yang diselenggarakan oleh Setdukkab pada 23 Februari 2026;
2. Mengikuti rapat stimulus diskon transportasi dan skema Work From Anywhere (WFA) periode lebaran idul fitri 2026 untuk mendukung pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara serta peningkatan pertumbuhan sektor akomamin pada 27 Januari, 30 Januari, dan 6 Februari 2026.
3. Dilaksanakan kuliah umum terkait SDM sektor pariwisata di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada 24 Februari 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Teridentifikasi berbagai permasalahan, tantangan, dan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pencapaian indikator sektor pariwisata pada 2026;
2. Tercapainya pertumbuhan yang signifikan pada sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan koordinasi pencapaian indikator pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman, masih terdapat sejumlah kendala baik dari sisi internal

maupun eksternal. Dari sisi internal, pencapaian indikator memerlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha, sehingga perbedaan kewenangan, prioritas program, ketersediaan data, dan waktu pelaksanaan kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas sinkronisasi. Sementara itu, dari sisi eksternal, dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global berpotensi menekan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya transportasi dan operasional usaha, serta mempengaruhi arus kunjungan wisatawan mancanegara. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan aktivitas pariwisata dan permintaan terhadap jasa akomodasi serta makanan dan minuman.

Sebagai upaya perbaikan, koordinasi pencapaian indikator pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman perlu diperkuat melalui forum koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara berkala, didukung dengan penyelarasan program, pembagian peran yang jelas, serta pemutakhiran data dan informasi kinerja secara terpadu. Selain itu, diperlukan penguatan pemantauan terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan geopolitik global sebagai dasar penyusunan langkah antisipatif, termasuk diversifikasi pasar wisatawan, penguatan pasar domestik, peningkatan konektivitas dan kemudahan perjalanan, serta penyusunan stimulus yang responsif untuk menjaga mobilitas wisatawan dan daya saing pelaku usaha. Upaya tersebut perlu disertai dengan pengembangan event berkualitas dan promosi destinasi yang terarah agar permintaan terhadap layanan akomodasi serta makanan dan minuman dapat terus terjaga.

4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

Latar Belakang

Indikator ini menunjukkan jumlah uang yang dibelanjakan oleh wisatawan mancanegara selama kunjungan mereka di suatu negara. Pengeluaran ini mencakup berbagai aspek, seperti: Akomodasi, Makanan dan Minuman, Transportasi, Belanja, Tiket Masuk Objek Wisata, Layanan Pribadi, dan Kegiatan Wisata. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara merupakan indikator utama dalam mengukur capaian devisa dari sektor pariwisata. Indikator ini mencerminkan besarnya nilai ekonomi yang dibelanjakan oleh wisatawan asing selama kunjungan mereka di Indonesia. Peningkatan devisa pariwisata secara langsung bergantung pada kemampuan Indonesia dalam menarik wisatawan berkualitas dengan tingkat belanja tinggi. Salah satu pendekatan strategis untuk mencapai

hal ini adalah melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dimaksud mencakup perluasan dan penguatan aksesibilitas wilayah

destinasi pariwisata, baik melalui jalur udara, laut, maupun darat, serta peningkatan integrasi transportasi antar destinasi prioritas. Melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas pariwisata ini, diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi lebih mudah dan nyaman, memperluas jangkauan destinasi yang dikunjungi, memperpanjang lama tinggal, serta mendorong peningkatan aktivitas wisata yang berdampak langsung terhadap pengeluaran wisatawan mancanegara sehingga dapat secara signifikan berkontribusi terhadap capaian devisa dan peningkatan daya saing sektor pariwisata.

Dalam pencapaian IKU ini, peran Deputy V sebagai policy orchestrator yang menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas

kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Peran ini mencakup penyelarasan kebijakan sektor pariwisata dengan sektor pendukung utama, seperti transportasi, perhotelan, perdagangan, dan UMKM, guna memastikan bahwa pengeluaran wisatawan mancanegara memberikan dampak ekonomi yang optimal dan terdistribusi secara luas. Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Deputi V memastikan konsistensi arah kebijakan, efektivitas instrumen insentif, serta keterukuran dampak kebijakan terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Sementara itu, Kementerian Pariwisata berperan sebagai policy implementer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kebijakan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan indikator pengeluaran wisatawan mancanegara. Implementasi tersebut dilakukan melalui penguatan promosi destinasi pariwisata unggulan, penyelenggaraan event internasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas kunjungan, serta pengembangan produk pariwisata berbasis pengalaman, termasuk atraksi wisata, kuliner lokal, dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan memperpanjang lama tinggal, sehingga dapat mendorong peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara secara berkelanjutan.

Data Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui hasil Passenger Exit Survey. Survei tersebut menghimpun informasi mengenai karakteristik wisatawan mancanegara, pola perjalanan, lama tinggal, serta pola pengeluaran selama berada di Indonesia. Data hasil survei selanjutnya dipublikasikan oleh BPS melalui publikasi Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan tabel statistik terkait. Dengan demikian, dalam pemantauan capaian indikator, unit kerja tidak melakukan penghitungan secara mandiri, melainkan menggunakan data resmi yang dirilis oleh BPS.

Indikator Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dinyatakan dalam satuan dolar Amerika Serikat per kunjungan dan menggambarkan rata-rata pengeluaran setiap wisatawan mancanegara dalam satu kali kunjungan ke Indonesia. Data yang digunakan merupakan angka resmi BPS pada periode pelaporan yang tersedia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 1.400 - 1.479 USD/Kunjungan yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2026 dan RPJMN 2025-2029. Tidak terdapat target triwulanan pada dokumen perencanaan nasional, sehingga target triwulanan adalah hasil proyeksi internal Deputi V, untuk triwulan I 2026 indikator pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan ditargetkan sebesar 1.344 USD/kunjungan.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Pengeluaran Wisatawan Mancanegara mencapai 1345,61 USD/kunjungan atau tercapai 100,11% dari target triwulan I tahun 2026 ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Persentase	1.400 - 1.479	1.344	1.345,61	100,11 %

(USD/Kunjungan)					
-----------------	--	--	--	--	--

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator Pengeluaran Wisatawan Mancanegara mencapai USD 1.345,61 per kunjungan, atau sebesar 100,11% dari target Triwulan I yang diproyeksikan sebesar USD 1.344 per kunjungan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun masih berada pada batas bawah target tahunan 2026 sebesar USD 1.400–1.479 per kunjungan. Kinerja positif ini mencerminkan terjaganya kualitas belanja wisatawan mancanegara selama berkunjung ke Indonesia, yang antara lain didukung oleh pola konsumsi wisatawan pada layanan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, belanja, serta aktivitas rekreasi dan hiburan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pemetaan Isu Strategis dan Permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Arah Kebijakan dan Program Tahun 2026 dengan seluruh Eselon I Kementerian Pariwisata pada 30 Januari 2026
2	Pengumpulan Data dan Informasi terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Dampak Situasi Timur Tengah terhadap Pariwisata Indonesia pada 9 Maret 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Diskusi dengan pihak Jakarta Fashion Week terkait aktivasi event serupa di Borobudur pada 19 Januari 2026;
2. Menerima audiensi dari Kedubes Jerman pada 12 Februari 2026 terkait *Indonesia's Tourism Landscape*;
3. Menghadiri Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Event Internasional pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Penyelesaian Masalah Pengembangan Desa Wisata oleh Setdukkab pada 19 Februari 2026;

4. Menerima audiensi dari pelaku usaha asuransi untuk pembahasan pilot project implementasi asuransi pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo pada 3 Maret 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

5. Teridentifikasinya berbagai permasalahan, tantangan, dan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pencapaian indikator sektor pariwisata pada 2026;
6. Keputusan untuk mengkaji lebih jauh perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi beberapa negara potensial untuk meningkatkan devisa dan jumlah kunjungan wisman.
7. Pemetaan *event-event* potensial untuk menarik minat wisatawan mancanegara.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain: Dari sisi internal, koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha masih perlu diperkuat, termasuk dalam pembahasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang masih menghadapi ego sektoral dan perbedaan kepentingan antarinstansi, sehingga proses penyelarasan kebijakan belum selalu berjalan optimal. Dari sisi eksternal, ketidakpastian kondisi geopolitik global, khususnya situasi di Timur Tengah, dapat memengaruhi pola perjalanan, konektivitas penerbangan, dan daya beli wisatawan. Selain itu, kualitas serta keragaman produk wisata bernilai tambah di destinasi masih belum merata, termasuk ketersediaan event berskala internasional, atraksi premium, layanan pariwisata berkualitas, dan produk ekonomi kreatif yang mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa rekomendasi perbaikan untuk mencapai target rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara, yaitu: perlu didorong penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pengelola destinasi dalam penyusunan program yang lebih terintegrasi. Langkah yang dapat dilakukan antara lain pengembangan produk wisata bernilai tambah, peningkatan kualitas layanan dan amenitas, penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional, serta penguatan promosi yang menyasar wisatawan dengan potensi belanja tinggi. Selain itu, diperlukan perbaikan konektivitas menuju destinasi, penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan produk lokal, serta pemantauan berkala terhadap perkembangan geopolitik dan ekonomi global agar kebijakan promosi, insentif, dan fasilitasi perjalanan dapat disesuaikan secara cepat. Upaya tersebut

diharapkan dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan dan meningkatkan rata-rata pengeluaran selama berkunjung ke Indonesia.

4.3 Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Pariwisata; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis terkait bidang pembiayaan pengembangan pariwisata mencakup penyusunan draf regulasi tentang Dana Pariwisata Berkualitas (DPB).

Persentase keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

Tahap 4, rentang persentase 72,5 – 100%

Tahap 3, rentang persentase 46 – 72,5%

Tahap 2, rentang persentase 21 – 45%

Tahap 1, rentang persentase 0 – 20%

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian Realisasi Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF hingga triwulan I 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	-------------------	-------------------	-----------	-----------

IKU 4.3. Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF	Persentase	80	20	20	100
---	------------	----	----	----	-----

Realisasi triwulan I 2026 menunjukkan bahwa saat ini keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata masuk dalam Tahap 1, yaitu Perencanaan Kebijakan. Realisasi 20% mengindikasikan terselesaikannya Tahap 1, melalui pembahasan dan koordinasi penyusunan RPerpres tentang Dana Pariwisata Berkualitas.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan Rapat Finalisasi RPerpres tentang Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 pada tanggal 30 Januari 2026 untuk membahas perubahan muatan substansi terkait pemanfaatan Dana Program
2	Pelaksanaan Harmonisasi RPerpres tentang Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)	Terlaksana di TW 4 2025	Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi IQTF pada 27 Oktober dan 19 November 2025
3	Pengumpulan dan konsolidasi masukan substansi dari K/L terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi Substansi RPerpres Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF) pada 9 Desember 2025
4	Pelaksanaan rapat penyusunan draf awal RPermenko Perekonomian mengenai Peraturan Turunan dari Perpres IQTF	Tertunda dan digeser	

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan dikirimkan surat Menko Perekonomian nomor T/PH.02.01/41/M.EKON/02/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang permohonan kepada Bapak Presiden untuk penetapan RPerpres tentang Dana Pariwisata Berkualitas.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi adalah terdapatnya ketidaksamaan pemahaman antar K/L atas konsep kelembagaan IQTF.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan melakukan koordinasi dan diskusi rutin untuk membahas lebih dalam mengenai konsep pemanfaatan Dana Program IQTF.

Pencapaian Sasaran Program 5: **Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks

Efektivitas

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian

Kebijakan di Bidang

Koordinasi

Industri,

Ketenagakerjaan dan

Pariwisata

Latar Belakang

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) proses tahapan, yakni (i) Identifikasi Permasalahan, (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, (iii) Formulasi Kebijakan, serta (iv) Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi di antaranya **rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**. Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah:

1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
2. Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
5. Pengembangan Pariwisata.

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau

program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada tren-tren pada tahun sebelumnya. Adapun target triwulan I tahun 2026 ditetapkan dengan nilai yang sama.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 104,55 yang dikonversi ke skala indeks menjadi 4 (sangat efektif) atau mencapai 133,33% dari target Triwulan I sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4	133,33%

Perhitungan realisasi tersebut didasarkan atas pencapaian efektivitas pelaksanaan KSP di masing-masing Asisten Deputi dibawah lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Adapun isu strategis terkait pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil menjadi isu yang dikoordinasikan paling efektif dibandingkan dengan isu lainnya dengan nilai 124,93. Ringkasan realisasi nilai efektivitas KSP untuk masing-masing Asisten Deputi dan perhitungan nilai Indeks Efektivitas KSP Kedeputian adalah sebagai berikut:

No.	Isu Strategis	Realisasi TW I
1.	Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka	100,00
2.	Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil	124,93
3.	Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	100,00
4.	Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	100,00
5.	Pengembangan Pariwisata	100,00

$$\text{Indeks KSP Deputi IKP} = \sqrt[5]{124,93 \times 100 \times 100 \times 100 \times 100} = 104,55$$

Hasil akhir nilai Indeks KSP Deputi adalah 104,55 yang berada pada rentang sangat efektif (nilai Indeks 4).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Terlaksana	• Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan sektor industri telah dilaksanakan melalui serangkaian rapat koordinasi, forum diskusi, seminar, audiensi, dan focus group discussion (FGD) dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, serta pelaku usaha. Kegiatan tersebut difokuskan pada pemetaan isu strategis dan penyelesaian berbagai permasalahan di sektor industri agro, kimia, farmasi, tekstil, alas kaki, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka, termasuk penguatan hilirisasi industri, ketahanan bahan baku, investasi industri, implementasi TKDN/P3DN, pengembangan kendaraan listrik, serta peningkatan daya saing industri nasional. • Koordinasi penyusunan dan evaluasi kebijakan strategis juga terus diperkuat melalui pembahasan berbagai rancangan regulasi dan rekomendasi kebijakan, antara lain penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator mengenai percepatan pengembangan industri sediaan farmasi dan alat kesehatan, penyusunan regulasi pengendalian IMEI, evaluasi kebijakan peningkatan daya saing industri tekstil dan alas kaki, penguatan kebijakan vokasi, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta penyempurnaan regulasi yang

			mendukung penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan industri berkelanjutan. • Pelaksanaan koordinasi di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan tenaga kerja melalui pemetaan kebutuhan pelatihan welder dan hospitality, monitoring revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, evaluasi implementasi program Super Tax Deduction Vokasi, monitoring kebijakan upah minimum di berbagai wilayah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk penguatan perlindungan pekerja rentan, termasuk pekerja migran Indonesia dan isu pekerja anak. • Koordinasi percepatan pengembangan kawasan ekonomi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan melalui identifikasi isu kebijakan, evaluasi pelaksanaan kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan strategis seperti Rebana dan Batang, monitoring proyek strategis nasional, percepatan penyelesaian hambatan (debottlenecking), evaluasi pengadaan tanah, percepatan perizinan, serta koordinasi implementasi berbagai Peraturan Presiden yang mendukung percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur nasional. • Di bidang pariwisata, koordinasi difokuskan pada penguatan tata kelola destinasi wisata melalui penyusunan rancangan regulasi dan nota kesepahaman pemanfaatan kawasan cagar budaya, konsultasi publik penyusunan kebijakan tata kelola destinasi, serta monitoring dan evaluasi
--	--	--	---

			pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan terlaksananya fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pembangunan sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata secara terintegrasi.
2.	Penyiapan Survei Efektivitas Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Terlaksana	Survei telah disiapkan oleh tim Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait guna mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan solusi terhadap masalah tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya melakukan optimalisasi pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dengan menggunakan media daring sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 10.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan dukungan layanan pimpinan yang akan dilakukan pada periode triwulan I.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Efisiensi dan pemblokiran anggaran membatasi pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, serta pelatihan di berbagai bidang.
2. Koordinasi lintas kementerian/lembaga belum optimal akibat perubahan struktur organisasi, reorganisasi, kompleksitas pembagian kewenangan, dan perlunya harmonisasi regulasi.
3. Ketersediaan, validitas, dan integrasi data lintas sektor masih terbatas sehingga menghambat penyusunan dan implementasi kebijakan berbasis data.
4. Keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa unit kerja menghambat pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan secara optimal.

5. Masih terdapat tantangan sektoral, antara lain rendahnya utilisasi industri, ketergantungan bahan baku impor, belum optimalnya implementasi TKDN/P3DN dan ekosistem kendaraan listrik, belum terintegrasinya sistem informasi ketenagakerjaan, serta kendala dalam pengembangan kawasan ekonomi, PSN, dan tata kelola destinasi pariwisata.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi, FGD, forum bersama, rapat bilateral, dan optimalisasi koordinasi secara daring.
2. Meningkatkan integrasi, validasi, dan pemanfaatan data lintas sektor melalui penguatan kolaborasi teknis, penyelarasan data, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
3. Mempercepat penyelesaian regulasi strategis serta memperkuat implementasi kebijakan di bidang industri, termasuk TKDN/P3DN, pengembangan industri hulu, kendaraan listrik, dan peningkatan daya saing industri nasional.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan program ketenagakerjaan melalui penguatan sistem informasi pasar kerja, pengembangan dashboard ketenagakerjaan, optimalisasi monitoring berbasis teknologi, serta penguatan koordinasi tindak lanjut hasil monitoring.
5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kawasan ekonomi, PSN, dan pariwisata melalui pembagian tim kerja yang lebih fokus, penerapan target kinerja yang SMART, percepatan kerjasama lintas instansi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan mitra pembangunan.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: **Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

**Industri,
Ketenagaker
jaan dan
Pariwisata**

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu:

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
2. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Formula perhitungan indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Indeks} \\ &\text{Kepuasan Layanan Sinkronisasi,} \\ &\text{Koordinasi, dan Pengendalian} \end{aligned} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ &1 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ &2 + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ &3 + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep} 4 + \text{Indeks} \\ &\text{Kepuasan Layanan SKP Asdep} 5) / 5}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja berupa nilai Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 dengan nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu: (i) Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*); (ii) Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliability*); (iii) Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*); (iv) Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*); dan (v) Aspek Sikap dalam Layanan (*Empathy*). Seluruh aspek kepuasan tersebut dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu : (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Pada Triwulan I Tahun 2026, nilai indeks kepuasan layanan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata belum dapat diukur karena survey belum dilakukan dan baru dalam tahap persiapan dan penyusunan komponen survey dan responden.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri,	Persentase (%)	3 dari 4	-	-	-

Ketenagakerjaan, dan Pariwisata					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi Pelayanan Kegiatan Deputy	Terlaksana	1. Rapat Internal/Brief Mingguan rutin dengan Plt. Deputy; 2. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026.
2	Persiapan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Terlaksana	1. Rapat Internal/Brief Mingguan rutin dengan Plt. Deputy; 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Potensi Pengembangan Tanaman Malapari dan Produk Hilirnya Terutama Biofuel tanggal 12 Januari 2026; 3. Rapat Evaluasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi tanggal 19 Januari 2026; 4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026; 5. Rapat Koordinasi Pembahasan dan Pengisian Detail Data/Informasi terkait Pelatihan dan <i>Jobs Order</i>

			untuk <i>Welder</i> dan <i>Hospitality</i> tanggal 23 Januari 2026; 6. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Aduan pada Kanal <i>Debottlenecking</i> Satgas P2SP (Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah) tanggal 13 Februari 2026; 7. Koordinasi dan Forum Diskusi Identifikasi Arah Strategis dalam Mendorong Penguatan Tata Kelola dan Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tanggal 05 Maret 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit ke deputian lain mengenai Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.025.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 25 orang). Selain itu, survei dibuat dalam bentuk *google form* sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan dan anggaran untuk melakukan pencetakan bahan dapat dialihkan sebagian ke akun lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai serta memastikan pelaksanaan survei layanan dapat terlaksana sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

7

Sasaran Program 7:

Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 7: **Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 adalah sebesar 92%. Adapun target triwulan I sebesar 23%.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

yang telah terealisasi sebesar 23% atau mencapai 100% dari target Triwulan I sebesar 23% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	92%	23%	23%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Mengkoordinasikan penyusunan cascading IKU Deputi ke unit kerja Eselon II	Terlaksana	Dokumen PK, Manual IKU, dan Rencana Aksi telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan unit kerja di Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada 11 Maret 2026
2.	Mendukung bukti dukung rencana aksi RB General dan Tematik	Terlaksana	RB General berupa bahwa tata kelola dan proses kerja sudah diperbaiki sesuai rencana aksi telah diselenggarakan Workshop Penguatan Kapasitas dan Keimanan SDM Deputi V: "Akselerasi Analisis Data, Overview Sistematis Produk Kebijakan, dan Wawasan Jenjang Karir pada tanggal 11

			Maret 2026 sesuai dengan Laporan Nota Dinas Nomor: KP.07.06/174/D.V.M.EKON.1/03/202, tanggal 31 Maret 2026 dan workshop penyusunan matriks manajemen risiko pada tanggal 13 Maret 2026. RB Tematik berupa Sosialisasi Maklumat Pelayanan telah dilaksanakan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana informasi guna menunjang implementasi Zona Integritas.
3.	Melakukan monitoring dan Evaluasi Implementasi Renaksi agen perubahan tahun 2025	Terlaksana	Fasilitasi evaluasi rencana tindak Agen Perubahan dilaksanakan melalui serangkaian rapat koordinasi intensif bersama seluruh unit kerja di lingkungan Deputy V. Kegiatan ini difokuskan untuk mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan serta merumuskan solusi atas hambatan yang ditemukan. Hasil evaluasi tersebut menjadi basis dalam menyempurnakan langkah tindak lanjut, sehingga setiap inisiatif perubahan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi perubahan memberikan dampak nyata bagi kinerja organisasi.
4.	Menyusun Tim kerja untuk mendukung IKU Sekretaris Deputy	Terlaksana	Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor: 5 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Dukungan Teknis dan Administrasi Penyusunan Perencanaan, Pelaporan Program dan Anggaran, Monitoring Penyelesaian Isu Strategis dan Implementasi Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2026

			Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor: 6 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Dukungan Teknis dan Administrasi Koordinasi Implementasi Tata Kelola, Pembangunan Zona Integritas, dan Peningkatan Kepuasan Layanan pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2026
5.	Penyusunan Renja Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Perjanjian Kinerja Deputi V pada 15 Januari 2026 berdasarkan UND Nomor: AK.01.02/22/D.V.M.EKON.1/01/2026
6.	Penyusunan matriks manajemen risiko	Terlaksana	Telah diselenggarakan pelatihan manajemen risiko pada tanggal 10 s.d 13 Maret 2026 Telah diselenggarakan workshop penyusunan matriks manajemen risiko pada tanggal 13 Maret 2026
7.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	Pada Triwulan I tahun 2026, Pemanfaatan Aplikasi Srikandi di lingkungan Deputi V telah dioptimalkan untuk Mempercepat Proses Korespondensi antar Instansi serta Memperkuat Tata Kelola Digitalisasi Arsip yang Lebih Sistematis dan Akuntabel. Penyampaian Nota Dinas Nomor: TU.04/73/D.V.EKON.1/02/2026 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Keaktifan User Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

			Perekonomian
8.	Pelaksanaan pencatatan SIRUP Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN	Terlaksana	Deputi V secara Konsisten Melakukan Pencatatan SIRUP Sebagai Bagian dari Pengawasan Internal terhadap Kualitas Perencanaan Pengadaan. Melalui Evaluasi ini, setiap ketidaksesuaian Data dapat Segera diperbaiki Sehingga Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Deputi V Berjalan Lebih Akuntabel, Meminimalisir Revisi Anggaran, dan Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sebagai Bentuk Kepatuhan terhadap Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Deputi V telah melaksanakan Pemutakhiran Data pada Aplikasi SIRUP. Pengisian ini Mencakup Sinkronisasi antara DIPA dengan Rencana Paket Pekerjaan, yang Bertujuan untuk Menjamin Ketersediaan Informasi Rencana Pengadaan yang Terbuka bagi Penyedia dan Masyarakat Luas, guna Mendukung Efektivitas Tusi Deputi V. Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* dengan unit kedeputian lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk mengelola persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus

memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I di tahun 2026, unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata masih menghadapi beragam kendala dalam mencapai target Reformasi Birokrasi. Salah satu masalah krusial yang ditemukan adalah adanya sejumlah pegawai yang belum menyelesaikan kewajiban laporan pajak tahunan lantaran gangguan teknis pada proses migrasi sistem perpajakan. Guna mengatasi hal tersebut, upaya pendampingan mendalam dalam bentuk coaching clinic akan segera diselenggarakan untuk membimbing staf dalam menyelesaikan pelaporan pajak mereka. Dengan diterapkannya strategi ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif, produktif, dan berintegritas tinggi, yang pada akhirnya akan mendongkrak kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata serta memberikan hasil yang lebih maksimal bagi *seluruh pemangku* kepentingan.

Jakarta, 6 April 2026
Plt. Deputy Bidang Koordinasi
Industri, Ketenagakerjaan, dan
Pariwisata



Dida Gardera